

ISLAM DI INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN JEPANG

Lina Pusvisasari¹, Rima Nurunnisa², Ratih Andriani Khasanah³, Rafi Ahdiat Dwiputra⁴

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyyah

STAI Al-Azhary Cianjur

Email: nenglinapusvisa@gmail.com¹, rimanurunnisa002@gmail.com²,
jinaan.agniya@gmail.com³, muhammadraffiahdiat@gmail.com⁴

ABSTRAK

Kedatangan Jepang di Indonesia tahun 1942 menimbulkan dampak mendasar pada kehidupan umat Islam, yang awalnya dihadapkan pada kebijakan represif yang membatasi aktivitas organisasi agama dan mengawasi perkembangan keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika hubungan antara Islam dan Jepang secara kronologis selama periode pendudukan (1942-1945). Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis, yang meliputi studi pustaka dan analisis sumber primer serta sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan sikap Jepang terhadap Islam yang signifikan, dari awal pendudukan yang skeptis dan menekan, menjadi lebih akomodatif pada tahun 1943 akibat tekanan perang di Pasifik - terwujud antara lain dalam pembentukan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) sebagai wadah konsolidasi umat. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Jepang memanfaatkan Islam untuk kepentingan perangnya, periode pendudukan juga memupuk kesadaran nasional di antara umat Islam dan menyiapkan tenaga pemimpin yang berperan penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.

Kata Kunci: Islam Indonesia, Pendudukan Jepang, Masyumi, Kemerdekaan.

ABSTRACT

The arrival of Japan in Indonesia in 1942 had a fundamental impact on the lives of Muslims, who were initially faced with repressive policies that limited the activities of religious organizations and monitored Islamic developments. This research aims to examine the dynamics of relations between Islam and Japan chronologically during the occupation period (1942-1945). The research method used is the historical method, which includes literature study and analysis of primary and secondary sources. The results of the research show a significant change in Japan's attitude towards Islam: from the initial skeptical and oppressive occupation, it became more accommodating in 1943 due to the pressure of war in the Pacific - manifested, among other things, in the formation of the Indonesian Muslim Syuro Council (Masyumi) as a forum for the consolidation of the Ummah. The research conclusions show that although Japan utilized Islam for its war interests, the period of occupation also fostered national

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism Checker No 643

Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tasdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

awareness among Muslims and prepared leaders who played an important role in the struggle for Indonesian independence.

Keywords: *Indonesian Islam, Japanese Occupation, Masjumi, Independence.*

PENDAHULUAN

Islam merupakan kekuatan sosial dan politik yang penting dalam sejarah Indonesia, khususnya pada masa penjajahan. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 sebagai bagian dari Perang Asia Timur Raya, umat Islam berada dalam posisi strategis karena jumlahnya yang besar serta pengaruh ulama dan organisasi Islam di tengah masyarakat. Pada awal pendudukan, Jepang menerapkan kebijakan represif dengan membatasi aktivitas keagamaan dan organisasi Islam, meskipun propaganda Pan-Asiaisme dan semangat “Dai Nippon” sempat menimbulkan harapan akan pembebasan dari penjajahan Barat. Namun dalam praktiknya, pendudukan Jepang lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya dan mobilisasi rakyat demi kepentingan perang.

Seiring memburuknya kondisi perang Jepang sejak tahun 1943, kebijakan terhadap Islam mengalami perubahan menjadi lebih akomodatif. Jepang mulai merangkul ulama, mengaktifkan dan membentuk organisasi Islam seperti Masyumi, serta memanfaatkan sentimen keagamaan untuk memperoleh dukungan massa. Meskipun bertujuan melayani kepentingan perang Jepang, kebijakan ini justru membuka ruang bagi konsolidasi umat Islam, tumbuhnya kesadaran nasional, dan lahirnya kader-kader pemimpin yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kajian mengenai Islam di Indonesia pada masa pendudukan Jepang menjadi penting untuk memahami dinamika hubungan antara kekuasaan kolonial, agama, dan perjuangan menuju kemerdekaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis, yang meliputi studi pustaka dan analisis sumber primer serta sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah, menganalisis dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan, sebagai sumber data.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang diperoleh dari jurnal-jurnal akademik, artikel ilmiah, buku-buku dan sumber online terpercaya yang relevan dengan topik Islam di Indonesia pada masa Penjajahan Jepang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi documenter untuk data sekunder. Teknik analisis data yang terkumpul, dianalisis menggunakan model analisis inti (content analysis) melalui tahapan:

1. Reduksi data dengan mengidentifikasi konsep-konsep kunci
2. Penyajian data secara sistematis
3. Penarikan kesimpulan secara verifikatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Masuknya Jepang ke Indonesia

Sebagai negara fasis-militerisme di Asia, Jepang sangat kuat, sehingga meresahkan kaum pergerakan nasional di Indonesia. Dengan pecahnya Perang Dunia II, Jepang terjun dalam

kancah peperangan itu. Di samping itu, terdapat dugaan bahwa suatu saat akan terjadi peperangan di Lautan Pasifik. Hal ini didasarkan pada suatu analisis politik. Adapun sikap pergerakan politik bangsa Indonesia dengan tegas menentang dan menolak bahwa fasisme sedang mengancam dari arah utara. Sikap ini dinyatakan dengan jelas oleh Gabungan Politik Indonesia (GAPI).

Sementara itu di Jawa muncul Ramalan Joyoboyo yang mengatakan bahwa pada suatu saat pulau Jawa akan dijajah oleh bangsa kulit kuning, tetapi umur penjajahnya hanya "seumur jagung". Setelah penjajahan bangsa kulit kuning itu lenyap akhirnya Indonesia merdeka. Ramalan yang sudah dipercaya oleh rakyat ini tidak disia-siakan oleh Jepang, bahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kedatangan Jepang ke Indonesia dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar saja.

Pada tanggal 8 Desember 1941 pecah perang di Lautan Pasifik yang melibatkan Jepang. Melihat keadaan yang semakin gawat di Asia, maka penjajah Belanda harus dapat menentukan sikap dalam menghadapi bahaya kuning dari Jepang.¹

Sikap tersebut dipertegas oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda Van Starckenborgh Stachouwer dengan mengumumkan perang melawan Jepang. Hindia Belanda termasuk ke dalam Front ABCD (Amerika Serikat, Britania/Inggris, Cina, Dutch/Belanda) dengan Jenderal Wavel (dari Inggris) sebagai Panglima Tertinggi yang berkedudukan di Bandung.

Angkatan perang Jepang begitu kuat, sehingga Hindia Belanda yang merupakan benteng kebanggaan Inggris di daerah Asia Tenggara akhirnya jatuh ke tangan pasukan Jepang. Peperangan yang dilakukan oleh Jepang di Asia Tenggara dan di Lautan Pasifik ini diberi nama Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Dalam waktu yang sangat singkat, Jepang telah dapat menguasai daerah Asia Tenggara seperti Indochina, Muangthai, Birma (Myanmar), Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Jatuhnya Singapura ke tangan Jepang pada tanggal 15 Pebruari 1941, yaitu dengan ditenggelamkannya kapal induk Inggris yang bernama Prince of Wales dan HMS Repulse, sangat mengguncangkan pertahanan Sekutu di Asia. Begitu pula satu persatu komandan Sekutu meninggalkan Indonesia, sampai terdesaknya Belanda dan jatuhnya Indonesia ke tangan pasukan Jepang. Namun sisa-sisa pasukan sekutu di bawah pimpinan Karel Doorman (Belanda) dapat mengadakan perlawanan dengan pertempuran di Laut Jawa, walaupun pada akhirnya dapat ditundukkan oleh Jepang.²

Secara kronologis serangan-serangan pasukan Jepang di Indonesia adalah sebagai berikut: diawali dengan menduduki Tarakan (10 Januari 1942), kemudian Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, dan Arbon. Kemudian pada bulan Pebruari 1942 pasukan Jepang menduduki Pontianak, Makasar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali.

Pendudukan terhadap Palembang lebih dulu oleh Jepang mempunyai arti yang sangat penting dan strategis, yaitu untuk memisahkan antara Batavia yang menjadi pusat kedudukan Belanda di Indonesia dengan Singapura sebagai pusat kedudukan Inggris. Kemudian pasukan Jepang melakukan serangan ke Jawa dengan mendarat di daerah Banten, Indramayu, Kragan (antara Rembang dan Tuban). Selanjutnya menyerang pusat kekuasaan Belanda di Batavia (5 Maret 1942), Bandung (8 Maret 1942) dan akhirnya pasukan Belanda di Jawa menyerah kepada Panglima Bala Tentara Jepang Imamura di Kalijati (Subang, 8

¹ Baskara, N. (2009). *Kamikaze: Aksi Bunuh Diri Terhormat Para Pilot Jepang*. MediaPressindo.

² Sofianto, K. (2014). Garut Pada Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang (1942-1945). *Sosiohumaniora*, 16(1), 70-86.

Maret 1942). Dengan demikian, seluruh wilayah Indonesia telah menjadi bagian dari kekuasaan penjajahan Jepang.³

B. Masa Coba-Coba (April-Desember 1942)

1. Pembentukan militer Jepang di Indonesia

Pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran dari Markas Besar Tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran (termasuk semimiliter). Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh Kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi tiga wilayah pemerintahan militer⁴:

- a. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Kedua Puluh Lima (Tomi Shudan) untuk Sumatra Pusatnya di Bukit tinggi.
- b. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Keenam Belas (Asamu Shudan) untuk Jawa dan Madura, Pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut (Dai Ni Nankenkantai).
- c. Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu (Armada Selatan Kedua) untuk daerah perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi.

Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Seirei (Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Ke-16).⁵ Di dalam undang-undang itu antara lain berisi ketentuan sebagai berikut :

- a. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa.
- b. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang.
- c. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang.

Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Gunshirekan (panglima tentara) yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan (panglima tertinggi) sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi
- b. Gunseikan (kepala pemerintahan militer) yang dirangkap oleh kepala staf. Kepala staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gun seikanbu. Di lingkungan Gun seikanbu ini terdapat empat bu (semacam departemen) dan ditambah satu bu lagi, sehingga menjadi lima bu. Adapun kelima bu itu adalah sebagai berikut. 1) Somobu (Departemen Dalam Negeri) 2) Zaimubu (Departemen Keuangan) 3) Sangyobu (Departemen Perusahaan, Industri, dan

³ Vlekke, B. H. M. (2008). *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Kepustakaan Populer Gramedia.

⁴ Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia* (Vol. 6). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

⁵ Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 13(2), 189-205.

Kerajinan Tangan) atau urusan Perekonomian 4) Kotsubu (Departemen Lalu Lintas) 5) Shihobu (Departemen Kehakiman).

- c. Gunseibu (koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur) yang meliputi:

1) Jawa Barat : pusatnya di Bandung.

2) Jawa Tengah : pusatnya di Semarang.

3) Jawa Timur : pusatnya di Surabaya.

4) Ditambah dua daerah istimewa (Kochi) yakni Yogyakarta dan Surakarta.

2. Pembentukan Pemerintahan Sipil

Selain pemerintahan militer Jepang juga membentuk pemerintahan sipil untuk mendukung jalannya pemerintahan Jepang di Indonesia. Pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan UU No. 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan UU No. 28 tentang pemerintahan shu serta tokubetsushi. Dengan UU tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut UU No. 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah shu (karesidenan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah shu (karesidenan), shi (kotapraja), ken (kabupaten), gun (kawedanan), son (kecamatan), dan ku (desa/kelurahan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 shu.⁶

Pemerintahan shu itu dipimpin oleh seorang shucokan. Shucokan memiliki kekuasaan seperti gubernur pada zaman Hindia Belanda meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan shucokan dibantu oleh Cokan Kanbo (Majelis Permusyawaratan Shu). Setiap Cokan Kanbo ini memiliki tiga bu (bagian), yakni Naiseibu (bagian pemerintahan umum), Kaisaibu (bagian ekonomi), dan Keisatsubu (bagian kepolisian). Pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting sehingga menjadi daerah semacam daerah Swatantra (otonomi). Daerah ini disebut tokubetsushi (kota istimewa), yang posisi dan kewenangannya seperti shu yang berada langsung di bawah pengawasan gunseikan. Sebagai contoh adalah Kota Batavia, sebagai Batavia Tokubetsushi di bawah pimpinan Tokubetu shico. Pemerintah Jepang juga membentuk tonarigumi, yang pada masa sekarang ini kita kenal dengan Rukun Tetangga (RT). Tanorigumi ini digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi gerak-gerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintah Jepang.

3. Jepang dan Organisasi yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan

a. Gerakan 3A

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Gerakan Tiga A (3A) punya tiga semboyan yakni:

Nippon Pelindung Asia Nippon Pemimpin Asia Nippon Cahaya Asia Gerakan Tiga A didirikan pada tanggal 29 April 1942, tepat dengan Hari Nasional Jepang yakni kelahiran (Tencosetsu) Kaisar Hirohito. Gerakan ini dipelopori oleh Kepala Departemen Propaganda (Sendenbu) Jepang, Hitoshi Shimizu. Hitoshi Shimizu menunjuk tokoh pergerakan nasional, Mr Syamsudin (Raden Sjamsoeddin) sebagai Ketua.⁷

⁶ Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 13(2), 189-205.

⁷ Kelompok Kompetensi, B., Setianto, Y., Ariffiantono, S., Handoko, D. B., Rif'atul Fikriya, S. P., & Hum, S. Mata Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas (SMA).

Gerakan ini meliputi berbagai bidang pendidikan. Bidang pendidikan dapat memenuhi sasaran untuk menampung pemuda-pemuda dalam jumlah besar. Pendidikan ini berupa kursus kilat, setengah bulan, bagi remaja berusia 14-18 tahun. Cara pendidikannya cukup unik. Peserta harus bangun pagi-pagi buta, kemudian berolah raga, masak di dapur, mengurus kebun, dan menyapu. Memasuki siang hari, mereka berlatih olah raga Jepang seperti sumo, jiu jitsu, adu perang, dan sebagainya. Mereka dilatih untuk disiplin, sopan, dan tertib dalam pekerjaan. Malam harinya, mereka dilatih bahasa Jepang. Ada juga subseksi Islam yang disebut Persiapan Persatuan Umat Islam. Subseksi Islam dipimpin oleh tokoh pergerakan Abikusno Cokrosuyoso.

Gerakan Tiga A (3A) tidak bertahan lama. Ini dikarenakan rakyat kurang bersimpati. Gerakan ini terlalu menonjolkan Jepang dan bukan gerakan kebangsaan. Bagi golongan intelektual yang bergerak dalam politik Tiga A (3A), gerakan ini juga dianggap kurang menarik karena tidak ada manfaat dalam perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan. Maka pada akhir 1942, Gerakan Tiga A (3A) dibubarkan.⁸

b. Putera (Pusat Tenaga Rakyat)

Sebagai ganti Gerakan Tiga A yang dibubarkan karena tidak efektif, Jepang memprakarsai Pusat Tenaga Rakyat atau Putera. Putera dipimpin oleh tokoh nasional yang kerap dijuluki Empat Serangkai. Empat Dengan restu Jepang, Putera pun didirikan pada 16 April 1943. Tujuan Putera adalah membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan Belanda. Menurut Jepang, Putera bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Selain tugas propaganda, Putera juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi.⁹

c. Fujinkai

Fujinkai awalnya bagian wanita dari Putera. Setelah Putera dibubarkan, Jepang mempertahankan bagian wanitanya. Bagian wanita itu dibuat organisasi sendiri pada Agustus 1943 bernama Fujinkai. Selain beranggotakan para ibu, Fujinkai juga punya Bagian Pemuda yang bernama Josi Saimantai. Anggotanya para gadis yang berusia di atas 15 tahun. Fujinkai bertugas meningkatkan kesejahteraan dan¹⁰ kesehatan masyarakat. Anggotanya menggelar kegiatan pendidikan dan kursus-kursus. Anggota Fujinkai dilatih membuat dapur umum dan pertolongan pertama. Mereka juga melakukan kinrohoshi atau kerja bakti (wajib kerja tanpa upah).

d. MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia)

Sebuah organisasi Islam MIAI yang cukup berpengaruh pada masa pemerintah kolonial Belanda, mulai dihidupkan kembali oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada tanggal 4 September 1942 MIAI diizinkan aktif kembali. Dengan demikian, MIAI diharapkan segera dapat digerakkan sehingga umat Islam di Indonesia dapat dimobilisasi untuk keperluan perang. Dengan diaktifkannya kembali MIAI, maka MIAI menjadi organisasi pergerakan yang cukup penting di zaman pendudukan Jepang. MIAI menjadi tempat bersilaturahmi, menjadi wadah tempat berdialog, dan bermusyawarah untuk membahas berbagai hal yang menyangkut kehidupan umat.¹¹

⁸ Palmos, F. (2016). *Surabaya 1945: sakral tanahku*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

⁹ Oktorino, N. (2013). *Konflik Bersejarah-Ensiklopedi Pendudukan Jepang di Indonesia*. Elex Media Komputindo.

¹⁰ Azizah, N. (2017). Gender dan politik. *Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta, halaman, 155*.

¹¹ Aqsha, D. (2005). *Kiai Haji Mas Mansur, 1896-1946: Perjuangan dan Pemikiran*. Erlangga.

MAI senantiasa menjadi organisasi pergerakan yang cukup diperhitungkan dalam perjuangan membangun kesatuan dan kesejahteraan umat. Semboyan yang terkenal adalah “berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah berpecah belah”. Dengan demikian, pada masa pendudukan Jepang, MAI berkembang baik. Kantor pusatnya semula di Surabaya kemudian pindah ke Jakarta.

Adapun tugas dan tujuan MAI waktu itu adalah sebagai berikut:

- 1) Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia.
- 2) Mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman.
- 3) Ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.

C. Islam Indonesia dan Semangat Dai Nippon

1. Makna "Dai Nippon" dalam Propaganda Jepang

"*Dai Nippon*" berarti "Negara Jepang Besar", dalam konteks propaganda masa pendudukan Indonesia memiliki makna sebagai simbol kebanggaan nasional Jepang dan pemimpin gerakan persatuan Asia.

Secara harfiah, "Nippon" berarti "matahari terbit", yang sudah lama menjadi simbol identitas Jepang sebagai negara yang "muncul terlebih dahulu" di dunia Timur. Dalam propaganda, "Dai Nippon" diposisikan sebagai pusat peradaban Asia yang akan membebaskan benua ini dari dominasi Barat (imperialisme Eropa dan Amerika).

Jepang menyebarkan gagasan "Pan-Asiaisme" yang dibalut semangat "Dai Nippon" melalui gerakan "Tiga A" (Akari Asia, Anegata Asia, Ashita Asia), yang berarti "Jepang sebagai Cahaya Asia, Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia". Pesan ini disampaikan melalui radio, koran, pidato, dan simbol visual untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Jepang adalah "saudara tua" yang akan membimbing Indonesia menuju kemajuan dan kemerdekaan.

Tujuan Propaganda "Dai Nippon" adalah sebagai sarana untuk mengambil dukungan rakyat Indonesia untuk kepentingan perang Jepang melawan Sekutu, menghapus pengaruh budaya dan politik Barat yang dianggap merusak peradaban Asia dan membentuk identitas kolektif Asia yang dipimpin oleh Jepang sebagai negara terkuat dan paling beradab.

2. Pemanfaatan Simbol dan Sentimen Keagamaan

Jepang menyadari pentingnya Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga memanfaatkan simbol dan sentimen keagamaan untuk menarik simpati umat Muslim.

Pemanfaatan Simbol Islam Jepang memperbolehkan penggunaan simbol-simbol Islam seperti kalimah tayyibah, masjid, dan baju dalam kegiatan publik. Beberapa pejabat Jepang yang beragama Islam (seperti Abdul Muni' Aminada dan Moh Sayido Wakas) bahkan mengadakan khotbah jumat di masjid besar di Jakarta untuk membangun hubungan dengan umat. Dalam propaganda visual, Jepang juga sering menggambarkan tokoh Islam yang berpakaian rapi berdampingan dengan pejabat Jepang untuk menciptakan kesan harmoni antara agama dan kekuasaan.

Pemanfaatan Sentimen Anti-Barat

Masyarakat Islam Indonesia telah lama memiliki pandangan anti-Barat karena pengalaman penjajahan Belanda yang melarang aktivitas keagamaan dan merusak nilai-nilai Islam. Jepang memanfaatkan sentimen ini dengan menyatakan bahwa pendudukannya bertujuan untuk "menghapus pengaruh Barat yang menindas agama dan

bangsa". Jepang juga menyebarkan informasi bahwa Barat adalah "musuh agama" yang ingin menghancurkan Islam di Asia, sehingga memosisikan diri sebagai "pelindung agama" yang harus didukung oleh umat Muslim.¹²

3. Upaya Jepang Menarik Simpati Ulama dan Tokoh Islam

Untuk mendapatkan dukungan umat Muslim, Jepang melakukan berbagai upaya untuk merangkul ulama dan tokoh Islam, yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat.

a) Pembentukan Organisasi Keagamaan

Pada awal pendudukan, Jepang memperbolehkan organisasi Islam yang sudah ada seperti Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) (yang didirikan pada 1937) tetap beroperasi, karena dianggap dapat membantu memobilisasi umat untuk kepentingan perang. Namun ketika MIAI dianggap kurang patuh dan menguntungkan, Jepang membubarkannya pada tahun 1943 dan menggantikannya dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Masyumi dibentuk sebagai organisasi keagamaan terpusat yang diharapkan lebih patuh pada kebijakan Jepang dan dapat membantu menyebarkan propaganda "Dai Nippon" kepada umat Muslim.¹³

b) Pelatihan dan Pemberian Jabatan

Jepang mendirikan kantor urusan agama dan mengadakan pelatihan bagi para ulama untuk memahami kebijakan pemerintah dan menyebarkan pesan propaganda dalam khotbah dan ceramah. Beberapa tokoh Islam juga diberikan jabatan dalam pemerintahan militer Jepang, seperti K.H. Mas Mansur (ketua MIAI dan pengurus besar Muhammadiyah) yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) dan kemudian menjadi bagian dari pimpinan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA).¹⁴

4. Keterlibatan Tokoh Islam dalam Propaganda Jepang

Keterlibatan tokoh Islam dalam propaganda Jepang adalah masalah yang kompleks, di mana sebagian tokoh terlibat sebagai bentuk strategi untuk melindungi umat dan memajukan aspirasi nasional, sementara yang lain terlibat karena tekanan atau kepentingan pribadi.

a) Bentuk Keterlibatan

Pidato dan Ceramah: Banyak tokoh Islam memberikan pidato dan ceramah yang menyebarkan pesan "Dai Nippon" dan Pan-Asiaisme, namun seringkali menyisipkan pesan tersembunyi tentang pentingnya persatuan umat Islam dan persiapan kemerdekaan. Misalnya, K.H. Mas Mansur dalam pidato di PUTERA sering menekankan bahwa "kerjasama dengan Jepang adalah langkah untuk mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya".

Kegiatan Organisasi: Tokoh Islam yang terlibat dalam Masyumi dan PUTERA membantu menyebarkan propaganda Jepang melalui kegiatan organisasi, seperti pelatihan pemuda, penyebaran koran, dan pengorganisasian upacara keagamaan yang juga mengandung elemen propaganda "Dai Nippon".

b) Alasan Keterlibatan

Strategi Perlindungan: Banyak tokoh Islam melihat keterlibatan dalam propaganda Jepang sebagai cara untuk melindungi umat dari tekanan militer dan mempertahankan kebebasan beragama.

¹² Turmudi, E., & Sihbudi, M. R. (Eds.). (2005). *Islam dan radikalisme di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.

¹³ Achmad, Z. A. (2014). Perbandingan Sistem Pers. *Lutfansah Mediat*.

¹⁴ Asmaya, E. (2003). *Aa Gym, dai sejuk dalam masyarakat majemuk*. Pt Mizan Publika.

Aspirasi Nasional: Beberapa tokoh juga melihat kesempatan untuk memajukan aspirasi nasional, karena Jepang menyebarkan gagasan kemerdekaan dan memperbolehkan aktivitas nasionalis yang sebelumnya dilarang oleh Belanda.

D. Konsolidasi Politik Jepang Terhadap Islam (tahun 1943)

1. Perubahan Kebijakan Jepang Akibat Tekanan Perang

Pada awal pendudukan (1942), Jepang membatasi aktivitas politik dan agama, melarang organisasi Islam yang dianggap mengganggu stabilitas. Namun, kondisi perang memburuk seiring kekalahan Jepang di Pertempuran Guadalcanal (Agustus 1942 - Februari 1943) dan kematian Laksamana Isoroku Yamamoto (April 1943), yang membuat Jepang kehabisan tenaga dan sumber daya. Untuk mengatasi hal ini, Jepang mengubah kebijakan menjadi lebih "membuka" terhadap Islam, dengan tujuan untuk mengumpulkan dukungan massa untuk perang "Asia Timur Raya" dengan retorika "pembebasan dari penjajahan Barat", memanfaatkan jaringan ulama dan pesantren untuk mengendalikan masyarakat dan mencegah perlawanan dan menyusun tenaga kerja dan tentara sukarela dari kalangan umat Islam.

2. Pembentukan Kantor Urusan Agama (Shumubu)

Untuk mengatur dan mengendalikan urusan agama secara terstruktur, Jepang mendirikan Kantor Urusan Agama (Shumubu) pada tahun 1943 di Jakarta, yang menjadi cikal bakal Kementerian Agama Indonesia pasca-kemerdekaan.

Fungsi Shumubu di antaranya adalah untuk mengkoordinasikan aktivitas keagamaan, termasuk pencatatan nikah, talak, dan rujuk, berkomunikasi dengan ulama dan organisasi Islam untuk menerapkan kebijakan Jepang dan mempromosikan ajaran Islam yang selaras dengan tujuan perang Jepang (misalnya, konsep "jihad" untuk mempertahankan "tanah air Asia").

3. Pengakuan terhadap Peran Ulama dan Pesantren

Sebelum tahun 1943, Jepang meragukan peran ulama dan pesantren yang dianggap sebagai pusat perlawanan. Namun, akibat kebutuhan akan dukungan massa, Jepang mulai mengakui dan memanfaatkan mereka.

Adapun bentuk pengakuannya antara lain mengizinkan ulama mengadakan ceramah dan khotbah, dengan syarat isinya mendukung perang Jepang, membiarkan pesantren beroperasi dan bahkan memberikan bantuan terbatas untuk pendidikan agama dan memasukkan ulama ke dalam lembaga pemerintahan lokal dan organisasi Islam yang dikelola Jepang.

4. Latihan Militer dan Mobilisasi Umat Islam

Tujuan utama mobilisasi umat Islam adalah menyediakan tenaga untuk perang. Jepang membentuk beberapa unit militer dan organisasi pemuda yang diisi oleh muslim. Unit-unit yang dibentuk diantaranya:

- a) Heiho (Pembantu Tentara): Pemuda Indonesia yang dilatih untuk membantu tentara Jepang di medan perang atau tugas pendukung.
- b) Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA): Dibentuk pada 3 Oktober 1943, berjumlah 69 batalion (3 di Bali, 66 di Jawa), dengan seluruh komandan batalion di Jawa adalah muslim, dan 20 di antaranya adalah kiai haji.
- c) Laskar Hizbullah: Dibentuk pada November 1944, terdiri dari 500 kader pesantren yang dilatih di Cibusah Bogor selama 3 bulan, yang kemudian menjadi bagian dari

Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pasca-kemerdekaan.

- d) Seinendan: Organisasi pemuda yang melakukan latihan fisik dan politik, yang menjadi tempat berkarier tokoh militer seperti Abdul Haris Nasution. Konsolidasi politik Jepang terhadap Islam pada tahun 1943 adalah respons terhadap tekanan perang yang semakin berat. Meskipun tujuan utamanya adalah memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan perang, kebijakan ini juga memberikan ruang bagi perkembangan kesadaran nasional, pengorganisasian umat Islam, dan pembentukan tenaga pemimpin yang kemudian berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perubahan ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara penjajah dan masyarakat yang dijajah, di mana kekuatan yang dimanfaatkan bisa saja berbalik menjadi kekuatan yang melawan.

E. Bangkitnya Masyumi (November 1943 - September 1944)

1. Latar Belakang Pembentukan Masyumi

Masyumi didirikan pada 24 Oktober 1943 (dimulai beroperasi secara penuh sejak November 1943) sebagai respons dari perubahan kebijakan Jepang terhadap Islam,¹⁵ yang dipicu oleh beberapa faktor kunci:

a. Kegagalan MIAI dalam Memenuhi Tujuan Jepang

Setelah mengaktifkan kembali MIAI pada September 1942, Jepang berharap organisasi ini dapat sepenuhnya mendukung perang "Asia Timur Raya". Namun, MIAI berkembang menjadi tempat pertukaran pikiran yang melampaui kepentingan perang, bahkan mulai membangun kesadaran umat terhadap masalah kemerdekaan. Jepang menjadi waspada karena MIAI tidak sepenuhnya patuh dan mulai menunjukkan sikap yang lebih mandiri, seperti ketika membentuk majelis pemuda dan keputrian yang berfokus pada pembangunan umat daripada hanya mobilisasi perang.

b. Tekanan Perang yang Semakin Berat

Kekalahan Jepang di Pertempuran Guadalcanal (1942-1943) dan kematian Laksamana Isoroku Yamamoto (April 1943) membuat Jepang kehabisan tenaga dan sumber daya. Untuk mengatasi hal ini, Jepang membutuhkan sebuah lembaga Islam yang lebih terstruktur dan mudah dikendalikan untuk menggali dukungan massa, tenaga kerja, dan tentara sukarela dari kalangan umat Islam.

c. Kegagalan Mendapatkan Dukungan dari Nasionalis

Jepang juga gagal mendapatkan dukungan penuh dari tokoh nasionalis, sehingga beralih ke lembaga agama sebagai alternatif untuk mengendalikan masyarakat. Para kyai di pedesaan dianggap memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam memengaruhi perilaku massa, sehingga Jepang berusaha memanfaatkan jaringan ulama dan pesantren melalui Masyumi.

2. Peran NU dan Muhammadiyah dalam Masyumi

Pada awal pembentukannya, Masyumi berupa federasi dari empat organisasi Islam utama: Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam (PUI), dan

¹⁵ Abdillah, M. (2015). *Islam dan Demokrasi Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*. Prenada Media.

Persatuan Umat Islam Indonesia (PUII). NU dan Muhammadiyah berperan sebagai tulang punggung Masyumi, masing-masing membawa kekuatan yang berbeda¹⁶:

- a. Peran Nahdlatul Ulama (NU)
 - 1) Kekuatan di Pedesaan: NU memiliki jaringan yang luas di daerah pedesaan melalui pesantren, dengan kepemimpinan kyai yang dihormati. Hal ini membuat NU menjadi kunci untuk menggerakkan massa untuk mendukung program Jepang maupun membangun kesadaran nasional.
 - 2) Kepemimpinan dalam Masyumi: Pendiri NU, KH. Hasyim Asy'ari, menjabat sebagai Ketua Umum Masyumi pada awal pembentukannya, memberikan kredibilitas agama pada organisasi ini. Putranya, KH. Wahid Hasyim, juga aktif dalam pengelolaan Masyumi dan kemudian menjadi Menteri Agama pasca-kemerdekaan.
- b. Peran Muhammadiyah
 - 1) Kekuatan di Perkotaan dan Pendidikan: Muhammadiyah lebih dominan di daerah perkotaan, dengan fokus pada pendidikan dan pembangunan sosial. Muhammadiyah memberikan tenaga cendekiawan dan profesional untuk mengelola program Masyumi, seperti pendidikan dan kesehatan.
 - 2) Posisi sebagai Anggota Istimewa: Muhammadiyah menjadi "anggota istimewa" Masyumi, yang berarti masih mempertahankan otonomi internalnya. Pada masa penjajahan, banyak anggota Muhammadiyah aktif dalam Masyumi, dengan adagium yang populer: "Masyumi tempat berjuang, Muhammadiyah tempat beramal".
3. Masyumi sebagai Alat Jepang dan Wadah Konsolidasi Islam
Masyumi memiliki peran ganda yang kompleks selama masa penjajahan:
 - a. Sebagai Alat Jepang
 - 1) Mobilisasi Perang: Jepang menggunakan Masyumi untuk mempromosikan retorika "jihad fi sabilillah" dalam menghadapi sekutu, serta menggalang peserta untuk Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA) dan Heiho.
 - 2) Kontrol Sosial: Masyumi membantu Jepang mengendalikan masyarakat dengan mengatur aktivitas keagamaan, seperti pencatatan nikah dan talak, serta memastikan khotbah tidak mengandung isi yang menentang Jepang.
 - 3) Penyebaran Doktrin Jepang: Masyumi menyebarkan ajaran tentang "Asia Timur Raya" sebagai wilayah yang dipimpin oleh Jepang dan bebas dari penjajahan Barat.
 - b. Sebagai Wadah Konsolidasi Islam
 - 1) Penggabungan Kekuatan Islam: Masyumi menjadi tempat pertama di mana organisasi Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah bekerja bersama secara terstruktur, membangun jaringan dan solidaritas di antara umat.
 - 2) Pembangunan Kesadaran Nasional: Meskipun di bawah kendali Jepang, Masyumi juga menjadi tempat pertukaran pikiran tentang masa depan Indonesia, sehingga membangun kesadaran nasional di antara anggota dan masyarakat luas.
 - 3) Perlawanan Secara Terlindung: Beberapa tokoh Masyumi melakukan perlawanan secara tersembunyi, seperti menolak perintah Jepang untuk menjadi pekerja paksa (romusa) dan memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk tidak melakukan seikerei (penghormatan kepada Tenno Heika).

¹⁶ Fachruddin, F. (2006). *Agama dan pendidikan demokrasi: pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Pustaka Alvabet.

4. Kepemimpinan Tokoh Islam Nasional dalam Masyumi

Masyumi dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam nasional yang memiliki pengaruh besar, baik dalam ranah agama maupun politik. Beberapa tokoh utama antara lain:¹⁷

a. KH. Hasyim Asy'ari (Ketua Umum Masyumi 1943-1944)

- 1) Pendiri NU dan Pesantren Tebuireng, yang dianggap sebagai tokoh agung Islam Indonesia.
- 2) Peranannya adalah memberikan kredibilitas agama pada Masyumi dan menjembatani hubungan antara Jepang dan para kyai di pedesaan.

b. Mohammad Natsir (Anggota Dewan Syuro Masyumi)

- 1) Tokoh cendekiawan Islam dari Jakarta, yang kemudian menjadi Ketua Umum Masyumi pasca-kemerdekaan.
- 2) Selama masa penjajahan, ia membawa nuansa politik yang lebih jelas ke dalam Masyumi dan membangun hubungan dengan tokoh nasionalis seperti Sukarno.

c. Kartosuwiryo (Anggota Masyumi)

Tokoh muda yang aktif dalam gerakan pemuda Islam. Ia kemudian mendirikan Tentara Islam Indonesia (TII) pasca-kemerdekaan.

d. Harsono Cokroaminoto dan Prawoto Mangun Sasmito

Tokoh-tokoh muda yang membawa Masyumi ke arah perjuangan kemerdekaan dan mempromosikan kesadaran nasional di antara anggota.

Bangkitnya Masyumi pada periode November 1943 - September 1944 merupakan fenomena yang kompleks dalam sejarah Islam Indonesia masa penjajahan Jepang. Meskipun awalnya dibentuk sebagai alat Jepang untuk mengendalikan dan memobilisasi umat Islam dalam perang, Masyumi juga berperan sebagai wadah konsolidasi kekuatan Islam yang membangun kesadaran nasional dan menyiapkan dasar bagi perjuangan kemerdekaan. Kepemimpinan tokoh Islam nasional dan peran NU serta Muhammadiyah membuat Masyumi menjadi entitas yang memiliki dampak mendalam pada perkembangan keislaman dan politik Indonesia pasca-kemerdekaan.

KESIMPULAN

Pendudukan Jepang di Indonesia terjadi dalam konteks Perang Dunia II dan melemahnya kekuatan Belanda di Asia Tenggara. Jepang berhasil menguasai Indonesia dalam waktu singkat melalui kekuatan militer dan strategi propaganda yang memanfaatkan kondisi sosial, budaya, serta kepercayaan masyarakat, termasuk ramalan Joyoboyo. Setelah berkuasa, Jepang membentuk pemerintahan militer dan sipil untuk mengendalikan wilayah Indonesia serta mendukung kepentingan perang Asia Timur Raya. Berbagai organisasi sosial, politik, dan keagamaan didirikan atau dimanfaatkan sebagai alat mobilisasi massa, meskipun pada dasarnya bertujuan memperkuat posisi Jepang dalam perang melawan Sekutu.

Namun demikian, kebijakan Jepang yang memanfaatkan Islam dan tokoh-tokoh pergerakan justru menimbulkan dampak yang berlawanan. Organisasi seperti MIAI, PUTERA, hingga Masyumi memang awalnya dijadikan alat propaganda dan kontrol sosial, tetapi kemudian berkembang menjadi wadah konsolidasi umat Islam dan tumbuhnya kesadaran nasional. Keterlibatan ulama dan tokoh Islam, meski berada di bawah tekanan dan pengawasan Jepang, turut melahirkan kader-kader pemimpin, organisasi, serta pengalaman politik dan militer yang sangat penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, masa pendudukan

¹⁷ Siregar, I. F. (2013). Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960). *Thaqaifiyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam*, 14(1), 88-103.

Jepang menunjukkan hubungan yang kompleks antara penjajah dan rakyat terjajah, di mana upaya eksploitasi justru ikut mempercepat proses menuju kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Benda, H.J. (1980). Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa Pendudukan Jepang (Terj. D. Dhakidae). Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Husni, M. (2015). Kondisi Umat Islam Masa Penjajahan Jepang. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 3(01), 60-67. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v3i01.1368>.
- Andreas, A. (2024, 27 Februari). Kantor Urusan Agama: Jejak Sejarah dalam Pengaturan Urusan Agama di Indonesia. *Pantau.com*. <https://www.pantau.com/news/198788/kantor-urusan-agama-jejak-sejarah-dalam-pengaturan-urusan-agama-di-indonesia>.
- Majelis Tabligh Muhammadiyah. (2024). Kepribadian Muhammadiyah, Gerakan Sosial Keagamaan yang Non-politik. <https://majelistabligh.id/kepribadian-muhammadiyah-gerakan-sosial-keagamaan-yang-non-politik/>
- Sunyoto, A. (2023, 28 Juli). Pesantren Tak Pernah Menyerah Melawan Penjajah. *NU Online*. <https://www.nu.or.id/amp/nasional/agus-sunyoto-pesantren-tak-pernah-menyerah-melawan-penjajah-Uml37>.
- Nashir, H. (n.d.). Muhammadiyah dan Jepang dalam Lintasan Sejarah. *Republika Online Mobile*. Diakses dari <https://khazanah.republika.co.id/berita/qwjih8366/muhammadiyah-dan-jepang-dalam-lintasan-sejarah-part1>
- Kompas.com. (2020). MIAI dan Masyumi, Cara Jepang Galang Dukungan Umat Islam. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/13/150000069/miai-dan-masyumi-cara-jepang-galang-dukungan-umat-islam>
- Scribd <https://share.google/GqVCKdTY5ND7zJAX9>
- Repositori Kemendikdasmen <https://share.google/7vMo0KPeUhG47bpxc>
- Tentang Guru. (2020). Mengenal MIAI dan Masyumi, Bentuk Perjuangan Umat Islam di Era Pendudukan Jepang. <https://www.tentangguru.com/nasional/1574380189/mengenal-miai-dan-masyumi-bentuk-perjuangan-umat-islam-di-era-pendudukan-jepang>